

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makro ekonomi. Dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini dilambangkan dengan huruf C, inisial dari kata *Consumption*. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakannya. Apabila pengeluaran – pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara tersebut (Dumairy,1997).

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, telah mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan. Ditambah dengan adanya perkembangan teknologi yang demikian pesat, selain berdampak pada perubahan struktur harga juga makin mempermudah akses pemasaran sehingga berpengaruh pada pola penawaran barang dan jasa, akibatnya terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang beredar dipasaran. Ini semua merupakan faktor – faktor yang semakin mempercepat perubahan pola konsumsi dalam masyarakat (Dumairy,1997).

Sudah kita ketahui bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga selalu menduduki tempat utama dalam penggunaan Produk Domestik Bruti (PDB), yaitu sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto Indonesia setiap tahunnya. Keadaan ini umum terjadi di negara mana saja bahwa konsumsi rumah tangga selalu menduduki

tempat utama dalam distribusi penggunaan Produk Domestik Bruto (Suparmoko, 1991).

Konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran untuk pembelian barang – barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, tabungan rumah tangga adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi.

Konsumsi adalah komponen tunggal terbesar dari GNP, mencakup 66 persen dari pengeluaran total dalam dekade terakhir ini. Dalam kehidupan sehari – hari, tidak pernah ada dua keluarga yang menggunakan uang mereka dengan cara yang tepat sama, angka – angka statistik menunjukkan bahwa rata – rata terdapat pola keteraturan umum dalam cara orang mengalokasikan uang mereka untuk membeli makanan, pakaian, dan barang – barang pokok lainnya. Ribuan penyelidikan mengenai pola pengeluaran rumah tangga pada berbagai tingkat pendapatan telah dilaksanakan, dan ternyata pada umumnya terjadi banyak kesamaan perilaku.

Para keluarga miskin tentu harus menggunakan pendapatannya terutama untuk kebutuhan pokok, seperti makanan dan perumahan. Begitu pendapatan meningkat, pengeluaran untuk beberapa bahan makanan akan meningkat terutama dengan menu yang lebih baik, makanan yang lebih mahal, termasuk buah – buahan dan berbagai sayuran. Akan tetapi ada batas terhadap tambahan uang yang dibelanjakan untuk makanan saat pendapatan meningkat, maka proporsi pengeluaran bahan makanan akan menurun, bila pendapatan meningkat.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bahan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan

rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga secara umum menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar propinsi. Termasuk dalam pengeluaran konsumsi adalah pengeluaran untuk pangan, pakaian, perumahan dan aneka barang dan jasa serta kebutuhan lainnya. Konsumsi makanan terdiri atas beras, lauk pauk, buah – buahan, minyak, gula, dan lain – lain. Konsumsi pakaian terdiri dari pakaian, sepatu, sandal, kaos kaki dan lain – lain. Konsumsi untuk perumahan terdiri dari sewa rumah, biaya penerangan, biaya pemeliharaan rumah dan bahan bakar (termasuk arang dan kayu) dan lain – lain. Konsumsi aneka barang dan jasa terdiri dari biaya pendidikan, transportasi, kesehatan, barang tahan lama dan lain – lain. Konsumsi lain – lain yaitu untuk pajak, televisi, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan dan sosial serta dana – dana lainnya yang belum tercantum.

Dalam perbandingan relatif terhadap pendapatan nasional, proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat makin lama makin menurun. Pada tahun 1970, 80% dari penggunaan Produk Domestik Bruto (PDB) teralokasikan untuk pengeluaran konsumsi masyarakat. Sepuluh tahun kemudian proporsi itu berkurang menjadi hanya sekitar 60%. Sekarang proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat dalam penggunaan Produk Domestik Bruto tinggal berkisar pada angka 50%. Penurunan proporsi relatif pengeluaran konsumsi masyarakat mengisyaratkan bahwa alokasi Produk Domestik Bruto semakin terarah kepada kegiatan yang lebih produktif (Dumairy, 1997).

Pada tahun 1993 rata – rata pendapatan perkapita orang Indonesia tercatat sebesar Rp.43.565,00 setiap bulannya menurut harga yang berlaku. Dari jumlah tersebut sebesar Rp. 21.770,00 (50,00%) diartikan sebagai pengeluaran konsumsi masyarakat.

konsumsi untuk makanan. Berarti lebih dari separuh pengeluaran konsumsi masyarakat habis untuk makan, termasuk minum dan merokok. Berdasarkan desa – kota, pengeluaran rata – rata orang kota hampir dua kali lipat pengeluaran orang desa. Pengeluaran bulanan penduduk pedesaan rata – rata hanya Rp.33.385,00 perkapita perbulan, sebesar Rp.21.228,00 (49,58) diantaranya digunakan untuk makanan. Orang desa dan orang kota tidak hanya berbeda dalam hal besarnya pengeluaran, akan tetapi juga tidak sama dalam hal pola konsumsi (Dumairy, 1997).

Dengan melihat kondisi yang terjadi ditingkatan pemerintah daerah khususnya di pemerintah daerah tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari kabupaten dan kota, penulis mengambil judul `` **PROPORSI KONSUMSI MAKANAN MENURUT STRATIFIKASI PENDAPATAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2002**``

## **B. Batasan Masalah**

Penulis membatasi sampel dalam penelitian ini hanya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Agar pembahasan tidak menyimpang terlalu jauh dari tujuan yang hendak dicapai dan agar pembahasan obyek yang akan diteliti bisa lebih mendalam, maka penulis membatasi masalah pada:

1. Proporsi konsumsi makanan menurut stratifikasi pendapatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002.
2. Data yang digunakan adalah data proporsi konsumsi makanan menurut stratifikasi pendapatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah ada perbedaan analisis antara tingkat pendapatan rumah tangga dengan tingkat konsumsi pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002.
2. Seberapa besar keterkaitan antara pendapatan dengan tingkat konsumsi pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara pendapatan dengan tingkat konsumsi pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002.
2. Untuk mengetahui besarnya kaitan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta 2002.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini:

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merencanakan kebijakan distribusi pendapatan dan juga pangan sehingga diharapkan ada pemerataan kesejahteraan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sebagai masukan bagi Dinas Pangan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih meningkatkan hasil produksi pangan dengan mengadakan pembinaan pada

para petani, sehingga para petani bisa menghasilkan produk pertaniannya dengan lebih berkualitas lagi.

3. Sebagai masukan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kualitas konsumsi pangan mereka, gizi keluarganya membaik. Dengan demikian dapat terbentuk sumber daya manusia yang bermutu.
4. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
5. Bagi penulis bisa menambah pengetahuan dari teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang berupa teoritis yang mana nantinya akan diterapkan dalam suatu kehidupan yang realitas dan sebagai salah satu untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 1 X